

Daftar Pustaka

Buku Literatur

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Anwary, Ichsan *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa, Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Arliman, Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish Publisher, Sleman, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 2010.
- Cohen, L. Morris dan Kent C. Olson, *Legal Research in a Nutshell*, West Publishing Co, Minnesota, 1992.
- Diantha, I. Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Kartayasa, Mansur, *Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Subasril, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2023.
- Marwan, Jimmy, *Kamus Hukum: Rangkuman istilah dan Pengertian dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Bandung, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Prakoso, Djoko, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono, *Jaminan Konstitusi tentang Proses Hukum yang Adil*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rohmat, Noor, *Sistem Peradilan Pidana*, K-Media, Yogyakarta, 2024.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tolib, Effendi, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Widiarty, Wiwik Sri, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 44).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6783).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801).

Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt. Pst.

Jurnal Ilmiah

Abas, Gunawan Hi, Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik, *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Vol. 03, No. 04, 2025.

Ahmad, Ahmad Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Arini, Miftahul Khaerati, Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong, *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, Vol. 3, No. 8, 2025.

Basri, Hasan, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.

Christianto, Hwian, Pembaharuan Makna Asas Legalitas, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 3, 2009.

Devitasari, Ananthia Ayu, Menakar Independendi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, 2020.

Dwianisa, Shindy, Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia, *Yusthika Mahasaraswati*, Vol. 05, No. 01, 2025.

- Enggarani, Nuria Siswi, Independensi Peradilan dan Negara Hukum, *Law and Justice*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Fauzi, Suyogi Imam Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51. No. 3, 2021.
- Fernando, Zico Junius, Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia, *Majalah Keadilan*, Vol. 21, No. 1, 2001.
- Hidayah, Siti dan Aris Setyo Nugroho, Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum dan Analisis Keadilan Prosedural, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 02, No. 1, 2025.
- Kasim, Akkah dan Andi Heridah, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4, 2025.
- Kasman, Mochammad, Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong, *Perspektif Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2025.
- Kautsar, Al, Izzy, dan Danang Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital, *Sapientia Et Virtus*, Vol. 7 No. 2, 2022.
- Kavenya, Andi, Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Pertimbangan Moral dan Hukum, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Latipulhayat, Atip, Editorial: Due Process of Law, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Maryam, Nur Sri, Penghapusan Tindak Pidana Melalui Abolisi dan Amnesti: Implikasi Yuridis Terhadap Penegakan Hukum dan Prinsip Non-Intervensi Politik, *Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Nasution, Rasina Pademi et. al, Praktek Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-20223, *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 02, No.1, 2024.
- Putra, Maharidiawan, Hukum dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi dari Aspek Kemajuan Teknologi), *Jurnal Morality*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Razak, Askari Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermanfaat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Jurnal Fundamental*, Vol. 12, No. 2, 2023.

- Safitri, Amalia dkk, Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum, *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, 2025
- Situmorang, Victoria H., Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Supriyanta, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2003.
- Sutrisno, Anom, Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Syaidi, Ridwan, Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden dalam Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, *Lex Jurnalica*, Vol. 22, No. 2, 2025.
- Utami, Niken Subekti Budi, Problematika Permohonan Grasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2008.
- Wulandari, Ayu dan Sidi Ahyar Wiraguna, Problematika Penerapan Prinsip *Due Process of Law* dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, *Politika Progresif Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2025
- Yuspar dan Fahmiron, Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong, *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Zamroni, Mohammad, Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 36, No. 2, 2024.

Laporan Penelitian, Skripsi

- Banurea, Heri Suandi, Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril), *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, 2020.

Media Online

- Christanto, Emil, 31 Juli 2024, Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-sistem-pembalikan-beban-pembuktian-lt513ff99d6eedf>, diakses pada pukul 20.14 WIB, tanggal 8 November 2025.
- Chrisianto, Eka Kurnia, 6 Agustus 2025, Landasan Hukum, Prosedur, dan Pengaturan Abolisi di Indonesia, <https://www.lawyerpontianak.com/2025/08/begini-landasan-hukum-prosedur-dan.html>, diakses pukul 17.30 WIB, pada tanggal 11 Desember 2025.

- Hukumonline, 15 September 2023, 9 Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-acara-pidana-lt6503bfdd1de92/?page=1>, diakses pada pukul 21.20 WIB, tanggal 5 November 2025.
- Hukumonline, 01 Agustus 2025, Presiden 'Putihkan' Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Melalui Abolisi dan Amnesti, <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-putihkan-tom-lembong-dan-hasto-kristiyanto-melalui-abolisi-dan-amnesti-lt688c10b36a053/?page=all>, diakses pukul 21.36 WIB, tanggal 13 Oktober 2025.
- Nurmalasati, Titik, 1 Agustus 2025, Tom Lembong Menerima Abolisi, Begini Mekanisme dan Syaratnya, <https://www.tempo.co/hukum/tom-lembong-menerima-abolisi-begini-mekanisme-dan-syaratnya-2053817>, diakses Pukul 16.23 WIB, pada tanggal 11 Desember 2025.
- Pasha, Karisna Mega Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi, 13 Juni 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/lt4bd6dab5117a4/#_ftn2, diakses pukul 11.00 WIB, tanggal 25 Oktober 2025.
- Prasetyo, Aji, , 18 Juli 2025, Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea, <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-4-5-tahun-penjara-di-kasus-impor-gula--tom-lembong--saya-terbukti-tidak-punya-mens-rea-lt687a4dbbcd428/?page=1>, diakses Pukul 21.42 WIB, tanggal 8 Desember 2025.
- Putri, Zunira, 01 Agustus 2025, Perjalanan Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara hingga Dapat Abolisi, <https://news.detik.com/berita/d-8039824/perjalanan-tom-lembong-divonis-4-5-tahun-penjara-hingga-dapat-abolisi>, diakses pukul 20.00 WIB, tanggal 13 Oktober 2025.
- SIP Lawfirm, 5 Agustus, Mengenal Apa itu Abolisi dan Amnesti, 'Hak Sakti' Presiden dalam Hukum Pidana Indonesia, <https://siplawfirm.id/apa-itu-abolisi/?lang=id>, diakses pukul 16.00 WIB, tanggal 26 Agustus 2025.
- Wicaksono, Adhi, 4 Agustus 2025, Isi Lengkap Keppres Abolisi Prabowo untuk Tom Lembong, <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20250804205203-12-1258662/isi-lengkap-keppres-abolisi-prabowo-untuk-tom-lembong/amp>, diakses Pukul 21.30 WIB, tanggal 8 Desember 2025.
- Yanuar, Yudoyono, 1 Agustus 2025, Kronologi Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-prabowo-beri-abolisi-tom-lembong-dan-amnesti-untuk-hasto-2053602>, diakses Pukul 21.50 WIB, tanggal 8 Desember 2025.